

BAB 8

Menavigasi Arus Zaman: Posisi Indonesia di Tengah Persaingan dan Perubahan

RR Emilia Yustiningrum & Ella Syafputri Prihatini

Bab ini menyintesis bab-bab sebelumnya untuk menyajikan analisis holistik mengenai posisi strategis Indonesia pada sebuah persimpangan krusial. Argumen utamanya adalah bahwa meskipun Indonesia telah dengan mahir menavigasi arus geopolitik eksternal melalui strategi *hedging*, kedaulatan strategis jangka panjangnya makin ditantang oleh konsekuensi domestik yang mendalam dari pilihan-pilihan ekonominya dan defisit tata kelola yang persisten. Bab ini diakhiri dengan menawarkan rekomendasi untuk jalan ke depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: emilia.yustiningrum@gmail.com

© 2026 Editor & Penulis

Yustiningrum, RR., E. & Prihatini, E. S. (2026). Menavigasi Arus Zaman: Posisi Indonesia di Tengah Persaingan dan Perubahan. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (273–292). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1725
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

A. Menakar Peran Aktor

Di kawasan Indo-Pasifik, setidaknya terdapat 32 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berbagai negara tersebut merupakan pelaku yang aktif dalam dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan. Interaksi antarnegara tersebut terjadi pada berbagai level mulai dari bilateral, regional, dan multilateral. Bahkan muncul kecenderungan saat ini yang berupa minilateral yang merupakan kumpulan beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik yang secara intensif bertemu, berdiskusi, merancang kerja sama, bahkan merespons salah satu isu penting di kawasan. Dalam konteks minilateral di Indo-Pasifik, berbagai negara yang tergabung di dalamnya tidak lagi berjuang secara bilateral, atau menggunakan organisasi regional seperti ASEAN, maupun organisasi multilateral, seperti PBB, tetapi berkelompok dalam skala kecil untuk membahas dinamika di kawasan. Setidaknya terdapat tiga kelompok minilateral di kawasan Indo-Pasifik, yaitu Quad, AUKUS, dan BRI.

Kelompok pertama adalah negara-negara yang tergabung ke dalam dialog keamanan yang dikenal dengan nama *Quadrilateral Security Dialogue* (*Quad*) yang terdiri atas Amerika Serikat (AS), Australia, Jepang, dan India. Quad adalah dialog keamanan dan belum merupakan organisasi multilateral yang mapan dalam arti memiliki dasar perjanjian, markas besar, dan anggaran. Pada awalnya Quad dibentuk sebagai respons berbagai negara ini terhadap tsunami yang terjadi di Samudra Hindia pada tahun 2004. Anggota-anggota Quad ini saling membantu untuk membangun wilayah yang porak-poranda akibat tsunami tahun 2004. Strategi AS ke kawasan Indo-Pasifik sebenarnya sudah dimulai masa Presiden Barack Obama pada tahun 2011 melalui kebijakan *pivot to Asia*, yang dilanjutkan dengan *Rebalance to Asia*, membangun kemitraan ekonomi melalui *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ketika Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri AS (WH, 2015). Selanjutnya Presiden Donald Trump mengeluarkan dokumen *National Security Strategy* (NSS) tahun 2017 untuk lebih banyak menggunakan istilah Indo-Pasifik daripada Asia Pasifik. Pada dasarnya NSS menerapkan nilai-nilai AS di kawasan, yaitu

penghormatan kedaulatan, mendukung kemerdekaan, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menegakkan demokrasi (DS, 2019, 6).

Australia merupakan salah satu pelopor Quad pada tahun 2004. Setelah melewati masa pasif selama kurang lebih satu dekade, Australia mulai menunjukkan perhatian terhadap kawasan Indo-Pasifik. Hal ini terjadi ketika pemerintahnya mengeluarkan *Australian Defence White Paper* tahun 2016 yang menyatakan wilayahnya sebagai *Indo-Pacific strategic arc* (DD, 2013). Bagi Australia, kawasan Indo-Pasifik yang ideal memegang prinsip penyelesaian konflik secara damai, penghormatan hak semua bangsa, dan pendukung pasar bebas (DFAT, 2017, 4). Namun demikian, Australia tidak tergesa-gesa dalam mendukung AS untuk melawan Tiongkok di kawasan, tetapi tetap memegang prinsip pragmatisme karena Tiongkok masih merupakan mitra dagang yang penting bagi Australia (Taylor, 2020).

Sementara itu, Jepang melalui Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe mulai menyuarakan perspektifnya mengenai Indo-Pasifik. Dalam pidato yang berjudul *Confluence of the Two Seas* pada tahun 2007, Shinzo Abe menekan perluasan Asia di mana Jepang memiliki tanggung jawab untuk mendukung serta memastikan keamanan dan kesejahteraan di kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Abe, 2007). Selanjutnya, Shinzo Abe memperkenalkan strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang berupa menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, memfasilitasi konektivitas antara benua Asia dan Afrika, serta mempromosikan kebebasan dan ekonomi pasar (Abe, 2016).

India mulai menunjukkan perhatian terhadap kawasan Indo-Pasifik melalui kebijakan *Look East Policy* tahun 1991, yang dilanjutkan dengan *Act East Policy*, yang memperlihatkan keterhubungan India dengan Asia Timur, memasukkan Laut China Selatan dan Samudra Pasifik dalam strategi geopolitiknya (MDI, 2015). Selanjutnya, India meluncurkan *Security and Growth for All in the Region* (SAGAR) tahun 2017 sebagai strategi memperkuat pengaruh di Samudra Hindia (MEAI, 2017). Bahkan PM India, Narendra Modi, memperkenalkan

konsep *Indo-Pacific Oceans Initiative* untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan stabilitas di kawasan laut (Chaudhury, 2019).

Kelompok minilateral kedua adalah pakta pertahanan yang beranggotakan Australia, Inggris, dan AS (AUKUS) yang dibentuk pada bulan September 2021. Pakta pertahanan ini bertujuan utama untuk mendukung Australia mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir melalui transfer teknologi AS dan Inggris ke Australia. Rancangan kapal selam mampu berada di bawah laut selama maksimal enam bulan dan daya jangkauan mencapai ke kawasan Indo-Pasifik.

Kelompok minilateral ketiga adalah Tiongkok yang membangun strategi *Belt and Road Initiative* (BRI) sejak tahun 2013, yang dilanjutkan dengan pembentukan *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB), dan juga *Maritime Silk Road* (MSR) sebagai upaya membangun konektivitas darat dan laut, membangun koridor ekonomi, dari kawasan Asia Timur ke Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Perkembangan BRI yang sangat pesat membuat akademisi Barat menyebutnya sebagai *Indo-Pacific with Chinese characteristics* (Medcalf, 2020, 4). Tiongkok memandang kebangkitan berbagai aktivitas dari AS dan negara-negara pendukungnya, juga munculnya minilateral di kawasan Indo-Pasifik, sebagai buih di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang akan hilang dengan sendirinya (MFAPRC, 2018).

B. Upaya Menekan Risiko

Selama lebih dari dua abad, Amerika Serikat (AS) selalu menempatkan Eropa sebagai mitra utama. Perubahan terjadi pada masa Presiden Barack Obama tahun 2011 yang mengubah orientasi strategi AS, baik pada aspek militer, diplomasi, maupun ekonomi ke kawasan Indo-Pasifik yang dikenal dengan nama *pivot to Asia* (Blackwill, 2024). Tujuan utamanya adalah merespons dinamika di kawasan Indo-Pasifik, kebangkitan Tiongkok, konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung selesai, dan mengurangi belanja militer ke kawasan Eropa. Sayangnya, strategi Presiden Barack Obama ini tidak menuai hasil positif karena dalam prosesnya, AS justru melakukan perubahan

internal yang semula membuka pasar bebas, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya di kawasan Indo-Pasifik, namun justru meningkatkan upaya defensif yang secara terang-terangan berusaha mengurangi risiko keamanan dan kepentingan nasional karena meningkatnya aktivitas Tiongkok di kawasan tersebut (Blackwill, 2024). Bahkan, AS mulai menjalankan kebijakan untuk mengontrol ekspor, penyaringan ketat atas investasi asing ke AS, pemberlakuan tarif tinggi untuk negara asing, mencampuri kebijakan industri domestik negara lain, dan memberlakukan sanksi ke negara lain (Blackwill, 2024).

Pada awalnya, AS membangun perjanjian perdagangan melalui *Trans Pacific Partnership* (TPP) tahun 2005 yang diawali kerja sama dengan Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura. Pada tahun 2011, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa TPP adalah kebijakan AS yang berhasil di kawasan Indo-Pasifik. Upaya AS tidak berlangsung lama, karena berbagai perubahan kebijakan internalnya, di tengah upaya memfasilitasi rantai pasokan global, AS justru melakukan *de-risking* atau pengurangan risiko dengan membangun lebih banyak institusi perdagangan di dalam negeri (Blackwill, 2024). Bahkan, pemerintahan Presiden Donald Trump menyalahkan Tiongkok karena meningkatnya defisit perdagangan AS dan kehilangan banyak lapangan pekerjaan di dalam negeri. Presiden Joseph Biden pada bulan Oktober 2022 justru semakin memberlakukan kontrol ekspor asing ke AS untuk produk-produk yang didominasi oleh Tiongkok.

Sementara itu, Tiongkok yang meluncurkan *Belt and Road Initiative* (BRI) tahun 2013, membentuk *Asian Infrastructure and Investment Bank* (AIIB) tahun 2016, memperkenalkan *Maritime Silk Road* (MSR) untuk membangun infrastruktur dan konektivitas laut di kawasan Indo-Pasifik, menggunakan berbagai upaya tersebut untuk merespons AS. Dalam situasi inilah rivalitas AS-Tiongkok dalam aspek perdagangan global ini sangat terlihat dan terbukti nyata.

Namun demikian, AS tidak serta merta melakukan keputusan hubungan dagang dengan Tiongkok, yang dikenal dengan nama

de-coupling dengan pertimbangan bahwa AS masih membutuhkan Tiongkok dalam berbagai aspek penting selain perdagangan global. Selanjutnya, AS mengembangkan konsep *de-risking*, yaitu mengurangi risiko terhadap ketergantungan rantai pasokan global dari Tiongkok tanpa harus memutuskan rantai tersebut secara total. Hal tersebut didukung oleh negara-negara anggota G-7 termasuk Uni Eropa dan juga India (Cave, 2023).

Pemerintah Tiongkok menanggapi kebijakan *de-risking* AS sebagai upaya yang tidak menunjukkan perubahan atau peningkatan dari berbagai periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena Tiongkok memaknai kebijakan *de-risking* AS sebagai upaya *de-coupling* yang terselubung, sebagai menjaga komitmen jangka panjang untuk tetap mendominasi perdagangan dan ekonomi global (Cave, 2023).

Dalam situasi persaingan antara AS melawan Tiongkok yang menunjukkan peningkatan pemberlakuan *de-risking* oleh AS, sebenarnya pemerintah Indonesia memiliki peluang untuk melakukan *hedging* dalam arti meningkatkan otonomi, mengurangi risiko, dan tidak hanya mendekatkan pemerintahnya pada kekuatan global yang dominan, baik AS saja maupun Tiongkok saja (Anwar, 2023; Priamarizki, 2024). Negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia umumnya melakukan strategi *hedging* dengan mendorong kerja sama ekonomi yang lebih kuat dengan Tiongkok, tetapi tetap mempertahankan pengaruh keamanan AS di kawasan Indo-Pasifik (Goh, 2007; Kuik, 2023). Prabowo Subianto yang terpilih menjadi presiden Indonesia mulai tahun 2024 juga memberlakukan kebijakan *hedging* melalui pemikirannya yang berjudul “The Road Ahead for Indonesia” dengan menyatakan bahwa “Sejalan dengan visi untuk posisi geopolitik negara kami [Indonesia], kami akan meneruskan kerja sama yang kuat dengan Tiongkok sebagai mitra ekonomi yang penting. Namun pada saat yang sama, kami akan memperluas dan memperdalam kerja sama kami dengan AS.” (Subianto, 2024).

C. Persaingan AS-Tiongkok

Dalam dunia internasional, terdapat dua peristiwa besar yang memengaruhi rantai pasokan mineral kritis yang dampaknya masih bisa dirasakan hingga kini. Peristiwa pertama adalah pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 yang membuat hampir semua aktivitas yang berkaitan dengan mineral kritis terhenti sementara. Peristiwa kedua adalah perang Rusia-Ukraina sejak bulan Februari 2022 yang membuat Rusia menghentikan pasokan energi khususnya gas alam ke berbagai negara, seperti kawasan Eropa Barat yang membuat negara-negara ini mencari alternatif solusi sumber energi baru, baik yang terbarukan maupun yang tidak bisa diperbarui.

Masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan menanggapi terganggunya rantai pasokan mineral kritis pada level internasional tersebut, Presiden Donald Trump pada periode pertama mengeluarkan dua surat perintah pengamanan rantai pasokan dan mineral kritis sehubungan tingginya kebutuhan Amerika Serikat (AS) mengenai hal tersebut yang pada saat itu mengalami ancaman yang luar biasa. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri AS mengeluarkan daftar 35 mineral kritis yang kemudian disempurnakan oleh Kementerian Perdagangan AS dalam bentuk strategi komprehensif mengenai mineral kritis (Burke, 2022, 40).

Selanjutnya, Presiden Joseph Biden pada tahun 2021 memperbarui surat perintah, tidak hanya mengenai kebijakan AS mengenai mineral kritis tetapi juga merumuskan laporan, pengkajian, investasi mengenai rentannya pemerintahnya terhadap rantai pasokan mineral kritis (Burke, 2022, 40). Untuk pertama kali, Presiden Joseph Biden juga menanggapi rivalitas geopolitik mengenai mineral kritis khususnya pemenuhan kebutuhan baterai kendaraan listrik (Giuli, 2023, 53).

Sementara itu, pemerintah Tiongkok menanggapi kelangkaan rantai pasokan mineral kritis dengan menyatakan bahwa pihaknya adalah pemimpin terdepan level global tidak hanya dalam pertambangan, tetapi juga pemrosesan, pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, hingga penyampaian ke pengguna atas berbagai

mineral kritis tersebut (Wu & Huy, 2022, 3). Pemerintah Tiongkok menyebutkan terdapat enam kategori mineral kritis, yaitu kobalt, tembaga, lithium, nikel, unsur tanah jarang (*rare earth elements*) dan silicon (Wu & Huy, 2022, 2). Bahkan pada peringatan 10 Tahun Sabuk dan Jalan Inisiatif (*Belt and Road Initiative*) tahun 2023, pemerintah Tiongkok kembali menyatakan komitmennya mengenai pembangunan energi hijau, peningkatan investasi energi rendah karbon, dan meninggalkan berbagai proyek batu bara global (Juani et al., 2024).

Pada bulan Januari 2014, pemerintah Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberlakukan larangan ekspor nikel mentah dan belum diproses yang mengharuskan pemrosesan dilakukan di dalam negeri yang dikenal dengan nama hilirisasi pertambangan. Melalui peraturan pemerintah tersebut, hanya berbagai perusahaan yang memiliki kemampuan untuk pemrosesan nikel atau yang melakukan hilirisasi yang akan mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Larangan ekspor tersebut tidak membatasi berbagai perusahaan domestik dan asing, sepanjang mampu melakukan hilirisasi nikel maka akan mendapatkan izin pembangunan *smelter* di Indonesia (IRENA, 2023, 113; Terauds, 2017). Lapangan ekspor nikel mentah berkontribusi pada peningkatan drastis atas harga nikel pada pasar internasional pada semester pertama tahun 2014, meskipun harga kembali normal karena kelangkaan bahan baku. Ketika pemerintah Indonesia mengalami defisit anggaran pada tahun 2016 khususnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, larangan ekspor nikel mentah sementara ditangguhkan, yang diberlakukan lagi pada bulan Januari 2020 (IRENA, 2023, 113).

Dalam jangka pendek, larangan ekspor nikel mentah mengakibatkan pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan ekspor, lapangan pekerjaan bidang pertambangan, dan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Namun dalam jangka panjang, larangan ekspor nikel mentah ini menarik berbagai investasi pemrosesan nikel dan membangun industri hilirisasi. Sebelum diberlakukan larangan ekspor nikel mentah tahun 2014, pemerintah Indonesia hanya memiliki

dua *smelter*, namun pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 30 *smelter* (Huber, 2021) dan bahkan pada tahun 2024 meningkat hingga 50 *smelter*. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah Indonesia berhasil menarik investasi asing mengenai pemrosesan nikel mencapai 15 miliar dolar AS (IRENA, 2023, 113).

Pada tahun 2023, Indonesia merupakan penerima dana pinjaman pembangunan terbesar melalui skema *Belt and Road Initiative* (BRI) dari pemerintah Tiongkok yang jumlahnya mencapai 7,03 miliar dolar AS dan menguasai hampir 90% pemrosesan nikel di Indonesia (Baskaran, 2024). Berbagai perusahaan asing Tiongkok yang beroperasi pada pemrosesan nikel adalah Tsingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt, Ningbo Lygend—part of CATL Group, Wuling Motors, and China Molybdenum Company (Baskaran, 2024).

Masuknya investasi Tiongkok mengenai hilirisasi nikel khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, melalui proyek *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP) membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai penyesuaian dalam aturan nasional mengenai hilirisasi. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara telah disempurnakan ke dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan. Perubahan signifikan dalam peraturan tersebut, antara lain (a) peningkatan manajemen dan aturan pada sektor pertambangan untuk meningkatkan pendapatan pada sektor ini, (b) pemerintah pusat memiliki kewenangan eksklusif atas pemberian izin usaha dan manajemen tambang yang bertujuan untuk mempersingkat atau menyederhanakan alur perizinan, meminimalisir rantai birokrasi, mengurangi praktik-praktik korupsi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta mengintegrasikan izin usaha tambang dari Kementerian ESDM untuk mempermudah restrukturisasi perusahaan dan transaksi investasi (Baskaran, 2024).

Sayangnya, berbagai perusahaan *smelter* Tiongkok yang mendapatkan izin di kawasan Morowali tidak memiliki kewajiban terhadap pemangku kepentingan atau persyaratan untuk memenuhi standar ESG yang tinggi. Hal ini dibarengi dengan standar analisa dampak lingkungan yang rendah, pembayaran upah buruh yang

hanya mengikuti standar UMR di provinsi Sulawesi Tengah, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di kabupaten Morowali. Akhirnya, para pekerja tambang harus mengambil kerja lembur untuk meningkatkan penghasilan bulanan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup di Morowali. Hal ini ditambah dengan tingginya angka kecelakaan kerja di Morowali, di mana pada bulan Desember 2023, terjadi ledakan di tungku yang menelan korban jiwa sebanyak 20 pekerja tambang (Baskaran, 2024).

Persoalan yang dihadapi *smelter* nikel di Morowali juga berkaitan dengan pengusuran mata pencaharian lokal (Mtero, 2017), memaksa penduduk setempat untuk bekerja tanpa keterampilan (Rubbers, 2020), kerusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran air (Castillo, Blumenthal, & Purdy, 2022), dan perampasan tanah (Toumbourou et al., 2022).

D. Investasi: Ekspektasi vs. Realisasi

Seiring dengan perkembangan rivalitas geopolitik AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik, investasi Tiongkok di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada periode 2019 hingga 2024, investasi Tiongkok menyumbang 18% dari seluruh investasi asing langsung ke Indonesia (KabarBursa, 2025). Investasi Tiongkok terutama difokuskan pada sektor hilirisasi sumber daya alam—khususnya pengolahan nikel—serta bidang transportasi, logistik/ pergudangan, dan telekomunikasi (Kurniawan, 2024). Proyek-proyek besar di Morowali (Sulawesi Tengah) dan Weda Bay (Maluku Utara) menjadi representasi kuat kehadiran Tiongkok dalam industri pengolahan nikel dan pengembangan kawasan industri terpadu di luar Pulau Jawa. Di sini lain, Jepang telah menanamkan investasi sebesar Rp75 triliun dengan fokus di sektor otomotif dan infrastruktur, dan Korea Selatan berinvestasi Rp20,8 triliun di sektor baterai kendaraan dan energi terbarukan.

Dalam pembahasan Bab 5 yang mengulas perkembangan investasi Tiongkok di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang mengokupasi pesisir di Kecamatan Mangkupalas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan

Utara, didapati bahwa realisasi investasi masih menghadapi banyak kendala. Persoalan utama terletak di segi perizinan yang belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun KIPI Kalimantan Utara tercatat sebagai skema proyek strategis nasional (PSN) berlabel hijau lewat Peraturan Pemerintah No. 109/2020, koordinasi pembahasan mekanisme tukar-menukar aset dan tata ruang masih menghambat upaya perluasan alokasi lahan. Proses ganti rugi juga belum tuntas, dengan kompensasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Realisasi dana investasi yang tidak sesuai dengan komitmen awal (CNNI, 2024) membuat pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan menjadi terhambat progresnya.

Dari berbagai catatan ketidaksesuaian rencana dan realisasi di proyek KIPI, dampak terhadap masyarakat lokal juga harus menjadi aspek yang perlu selalu dicermati. Laporan Mongabay pada awal tahun 2025 menyebutkan bahwa geliat pembangunan kawasan KIPI telah meresahkan masyarakat lokal di dua desa dengan 6.500 jiwa, termasuk para nelayan (Naem, 2025). Pembangunan pabrik-pabrik dan pembangkit listrik batu bara di pesisir pantai telah berdampak terhadap hasil tangkapan ikan yang terus menyusut. Akibat turunnya hasil tangkapan ikan, nelayan terbebani biaya operasional yang tinggi. Sebagian dari mereka telah beralih pekerjaan menjadi petani, pedagang, atau peladang kelapa sawit. Namun, berkebun pun sulit karena lahan-lahan telah masuk ke kawasan industri.

Visi menjadikan Indonesia sebagai PMD dan upaya merealisasikannya dengan menggandeng agenda politik Tiongkok lewat BRI tentu harus selalu mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia. Prioritas tertinggi harus selalu menempatkan Indonesia sebagai penerima manfaat terbesar dari semua program yang dilaksanakan.

KIPI perlu terus dikawal untuk memastikan penciptaan kawasan yang konsisten berorientasi energi terbarukan dan menopang ambisi mendorong transisi ekonomi hijau. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan guna mendalami evaluasi kesuksesan berbagai program yang menyandingkan visi nasional dengan agenda internasional, dalam

hal ini PMD dan BRI. Penelusuran secara lebih kritis dan objektif diperlukan untuk mencermati semua keuntungan dan kerugian yang muncul, sehingga pembangunan di Indo-Pasifik benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak.

E. Siber: Ujian Multilateralisme?

Dinamika rivalitas geopolitik di Indo-Pasifik juga harus selalu dipantau ketat sembari memperhatikan keamanan Indonesia di sektor siber. Sebagaimana dibahas di Bab 6, di satu sisi, prioritas keamanan siber Indonesia masih berkisar pada pengendalian konten informasi/ujaran dan pengembangan digitalisasi aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, ruang perhatian untuk keamanan jaringan dan data masih tergolong sempit.

Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara cenderung mengandalkan pendekatan multilateralisme karena kedekatan prinsip tersebut dengan nilai-nilai ASEAN Way. Keadaan ini membuat Asia Tenggara belum memiliki kesepakatan yang menyatukan persepsi ancaman terhadap keamanan siber, khususnya dan terutama pada bentuk-bentuk kejahatan siber (*cybercrime*). Selain itu, ketimpangan digital di antara negara-negara Asia Tenggara juga membuat upaya mengatasi kejahatan siber semakin sulit diatasi bersama-sama.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima lebih dari 153.000 laporan penipuan keuangan yang kerugiannya mencapai triliunan rupiah (Azzahra, 2025). Jika dirata-rata, jumlah laporan yang masuk ke IASC adalah 718 laporan per hari, atau 2–3 kali lebih banyak daripada negara-negara lain.

Pada 20 Juni 2024, server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami gangguan dan mengakibatkan layanan pembuatan paspor dan keimigrasian di semua bandar udara internasional di Indonesia terganggu (Sulistyo, 2024). Sebelumnya, di tahun 2020 sebuah e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia, juga mendapatkan serangan siber sehingga

lebih dari 91 juta data pengguna bocor. Kebocoran juga menimpa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di mana data nomor induk kependudukan (NIK) serta riwayat kesehatan lebih dari 279 juta warga Indonesia—termasuk mereka yang sudah meninggal dunia—telah diretas dan dijual di forum daring (Amindoni, 2021).

Kerentanan Indonesia di sektor siber menunjukkan kegagalan pemerintah melindungi warga negara pada era digital. Upaya untuk meminimalisir kerugian pun telah dilakukan lewat pengesahan Undang-Undang No. 27 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Oktober 2022. Namun hingga buku ini ditulis, pemerintah belum menerbitkan peraturan turunan dan membentuk lembaga pengawas independen. Tanpa peraturan turunan, sulit bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi administratif dan pidana. Ketiadaan lembaga pengawas independen juga berarti tidak ada badan eksekutif yang mengawasi kepatuhan.

Kebocoran data pribadi menjadi pintu masuk bagi maraknya judi *online* di Indonesia. Pengamat siber menilai banyak situs judi *online* ilegal mengandalkan kebocoran data pribadi untuk menargetkan korban lewat SMS, e-mail, dan WhatsApp (Respati & Setiawan, 2023). Situs judi kemudian menggunakan akses ini untuk menyebarkan *malware*, *phishing*, atau mengelabui pengguna agar mengunduh aplikasi ilegal. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melihat judi *online* dan kebocoran data pribadi sebagai dua kejahatan siber yang membutuhkan penanganan khusus. Pemerintah menetapkan tujuh Desk Program Prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan. Dari tujuh desk tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yakni Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi (KOMDIGI, 2025).

Kerja sama bilateral dan multilateral sangat diperlukan dalam upaya pemerintah melindungi Indonesia dari kejahatan siber yang tidak saja sangat merugikan secara ekonomi, tetapi juga sendi-sendi sosial dan moral. Diplomasi siber menjadi salah satu strategi penting yang harus diutamakan oleh Indonesia agar dapat menjaga keamanan

siber di Tanah Air dan di kawasan Indo-Pasifik. Contoh paling dekat dengan isu ini adalah kerja sama yang harus Indonesia perkuat dengan empat negara tempat tinggal para pengendali mayoritas bandar judi *online*; Tiongkok, Myanmar, Laos, dan Kamboja (Dwi & Puspita, 2024).

Sindikatan kriminal di negara-negara Mekong ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 43 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan 40% PDB gabungan Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tidak hanya judi *online*, mereka juga memfasilitasi perdagangan manusia dan pencucian uang. Untuk Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menaksir potensi kerugian akibat praktik judi *online* dapat menembus Rp1.000 triliun pada akhir 2025 jika tidak ada intervensi serius (Rakhmayanti, 2025). Di sinilah pentingnya pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera menjalani amanat UU PDP dan berbagai regulasi serta strategi nasional di bidang keamanan siber (antara lain Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber 2024–2028). Kebijakan di dalam negeri harus merefleksikan keseriusan dan urgensi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan di dunia siber.

F. Indonesia di Pasifik

Sebagai ulasan terakhir, Bab 7 menyebutkan bahwa upaya bersikap netral Indonesia dalam persaingan antara AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik membuat Indonesia berpeluang memainkan peran yang lebih strategis dengan negara-negara Pasifik Selatan. Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, inisiatif Indonesia seperti *Pacific Elevation*, *Indonesia-South Pacific Forum*, dan *Indonesia–Pacific Forum for Development* merefleksikan komitmen Indonesia untuk berperan lebih asertif. Namun, bagaimana kelanjutan kebijakan *Look East* melalui diplomasi kelautan dengan negara-negara di Pasifik di era Presiden Prabowo?

Pada April 2024, Presiden Prabowo mengunjungi Tiongkok dan Jepang sebagai upaya menunjukkan prioritas kebijakan *Look*

East Indonesia (TJP, 2024) sembari mengirimkan pesan bahwa pemerintahannya akan melanjutkan kerja sama dengan Tiongkok dan sekutu terkuat AS di Asia, Jepang. Prabowo secara konsisten menekankan kebijakan bertetangga baik atau *good neighbor*, yang sangat ia yakini sebagai pendekatan kebijakan luar negeri yang tepat untuk negara yang beragam seperti Indonesia—negara yang dikagumi karena kekayaan budayanya (Nasution, 2025). Keyakinan ini berasal dari nilai sosial Indonesia yang mengakar kuat, tetangga saling membantu di saat dibutuhkan dan memperlakukan satu sama lain seperti keluarga.

Berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang cenderung mengutamakan diplomasi ekonomi dan infrastruktur, Presiden Prabowo lebih mengutamakan aspek geoekonomi, pertahanan, dan kemitraan strategis (Yadav, 2025). Namun, pandangan kritis menilai kebijakan luar negeri Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo cenderung kehilangan identitas di kalangan Global South. Selain resmi bergabung menjadi anggota BRICS pada Januari 2025, kebijakan luar negeri Indonesia dinilai relatif minim inovasi meskipun Presiden Prabowo mengunjungi lebih banyak negara dibandingkan Presiden Joko Widodo (Utama, 2025).

Pada awal tahun 2025, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa kawasan Pasifik belum menjadi prioritas, berbanding terbalik dengan retorika diplomasi yang ditunjukkan dalam satu dekade terakhir (Wangge, 2025). Selama 10 tahun terakhir, hibah Indonesia untuk kawasan Pasifik dan Oseania nyaris separuh dari total hibah Indonesia di berbagai kawasan, yaitu sebesar Rp 1,14 triliun, namun kata Pasifik hanya disebutkan dua kali dalam pidato Menlu Sugiono. Kunjungan resmi Presiden Prabowo juga tidak pernah menghampiri kawasan Pasifik.

Keterlibatan Indonesia di Pasifik salah satunya bertujuan untuk memengaruhi opini politik atas isu kemerdekaan Papua. Kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan selama ini lebih banyak dilakukan di sektor non-kelautan yang tidak secara langsung mendukung keberhasilan diplomasi biru, yang hal ini dapat menjadi evaluasi bagi

para pengambil keputusan. Orientasi *land-based*, bukan *ocean-based*, masih mendominasi bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan. Fokus ini mencerminkan kurangnya perhatian Indonesia kepada persoalan kelautan dan perubahan iklim yang dialami kawasan Pasifik. Bila kebijakan di Pasifik tidak berubah dan benar-benar berorientasi *ocean-based* maka sangat sulit memengaruhi advokasi akar rumput yang dimotori kelompok masyarakat sipil Pasifik terkait persoalan politik dan hak asasi manusia di Papua Barat.

Di sini, pemerintahan Presiden Prabowo perlu menyusun ulang fokus kebijakan luar negeri terhadap kawasan Pasifik mengingat upaya yang sudah dibangun oleh rezim pendahulunya. Sumber daya yang telah dikeluarkan dan investasi diplomasi tingkat negara serta di level masyarakat juga patut menjadi pertimbangan utama. Kehadiran Indonesia di Pasifik tidak hanya penting untuk menegaskan filosofi *good neighbor*, tetapi juga aspek kritis dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah terutama di isu-isu terkait Papua Barat. Penelitian dan advokasi lebih lanjut masih sangat diperlukan guna meningkatkan literasi Pasifik dan memperkuat strategi mengukuhkan pengaruh Indonesia di salah satu kawasan yang sangat terdampak oleh perubahan iklim global ini.

Referensi

- Abe, S. (2007, August 22). "Confluence of the two seas" Speech by H.E. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at Parliament of the Republic of India [Press release]. <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>
- Abe, S. (2016, August 27). Address by prime minister shinzo abe at the opening session of the sixth Tokyo international Conference on African Development (TICAD) [Press release]. https://www.mofa.go.jp/af/af2/page4e_000496.html
- Amindoni, A. (2021, May 21). BPJS kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor - 'otomatis yang dirugikan masyarakat', kata pakar. *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>

- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, 36(2), 351–377. Doi:10.1080/09512748.2022.2160794
- Azzahra, N. (2025, June 25). OJK terima 153 ribu laporan penipuan keuangan. *Tempo.co*. https://www.tempo.co/hukum/ojk-terima-153-ribu-laporan-penipuan-keuangan-1805163#goog_rewarded
- Baskaran, G. (2024, July 11). Diversifying investment in Indonesia's mining sector. <https://www.csis.org/analysis/diversifying-investment-indonesias-mining-sector>
- Blackwill, R. D. (2024, August 1). The rise and fall of the economic pivot to Asia. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2024/08/01/lost-decade-us-economic-pivot-to-asia-defense/>
- Burke, S. E. (2022). Shiny objects: Repositioning the United States for critical mineral success. In S. E. Burke, L. Hughes, P. Q. Huy, K. Vekasi, & Y.-H. Wu (Eds.), *Critical Minerals: Global Supply Chains and Indo-Pacific Geopolitics. The National Bureau of Asian Research (NBR) Special Report 102* (pp. 35–43). National Bureau of Asian Research (NBR).
- Castillo, R., Blumenthal, L., & Purdy, C. (2022, September 21). Indonesia's electric vehicle batteries dream has a dirty nickel problem. *Brookings Commentary*.
- Cave, D. (2023, May 22). How 'decoupling' from China became 'de-risking'. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2023/05/20/world/decoupling-china-de-risking.html>
- Chaudhury, D. R. (2019, November 5). PM modi proposes Indo Pacific oceans initiative. *The Economics Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-modi-proposes-indo-pacific-oceans-initiative/articleshow/71915838.cms>
- CNNI. (2024, April 21). Luhut tagih janji investasi China terkait proyek di kaltara. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240421115711-92-1088634/luhut-tagih-janji-investasi-china-terkait-proyek-di-kaltara>
- DFAT. (2017). *2017 foreign policy white paper*. Department of Foreign Affairs and Trade (Australian Government).
- DS. (2019). *A free and open Indo Pacific. advancing a shared vision*. Department of State (US Government).

- Dwi, A., & Puspita, M. D. (2024, June 28). 4 negara ini kendalikan mayoritas bandar judi online di Indonesia. *Tempo.co*. https://www.tempo.co/ekonomi/4-negara-ini-kendalikan-mayoritas-bandar-judi-online-di-indonesia--45024#goog_rewarded
- Giuli, M. (2023). Geopolitics of the energy transition. In M. Asif (Ed.), *Handbook of Energy Transitions* (pp. 41–54). CRC Press.
- Goh, E. (2007). Great powers and hierarchical order in Southeast Asia: Analyzing regional security strategies. *International Security*, 32(3), 113–157. Doi:10.1162/isec.2008.32.3.113
- Huber, I. (2021, December 8). Indonesia's nickel industrial strategy. <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy>
- IRENA. (2023). *Geopolitics of the energy transition: Critical materials*. International Renewable Energy Agency (IRENA).
- Juani, A., Doris, A., Sulejmanagic, M., & Alam, M. (2024). Pulling sideways: How Indo-Pacific middle powers are responding to great-power competition across security, economic, and energy sectors. <https://fpanalytics.foreignpolicy.com/2024/06/24/indo-pacific-great-power-competition/>
- KabarBursa. (2025, May 06). [INFOGRAFIS] Sebaran investasi Cina vs Jepang vs Korea di RI. <https://www.kabarbursa.com/infografis/infografis-sebaran-investasi-cina-vs-jepang-vs-korea-di-ri>
- KOMDIGI. (2025, March 03). Tangani judi online, Meutya Hafid: Komdigi terapkan teknologi dan kerja lintas sektor [Press release]. Retrieved from <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9116>
- Kuik, C.-C. (2023). Shades of grey: riskification and hedging in the Indo-Pacific. *The Pacific Review*, 36(6), 1181–1214. Doi:10.1080/09512748.2022.2110608
- Kurniawan, A. (2024, November 12). Memblejeti investasi China Rp534,5 triliun di Indonesia, ini rincian dan sebarannya. *Sindo News*. Retrieved from <https://ekbis.sindonews.com/read/1487231/34/memblejeti-investasi-china-rp5345-triliun-di-indonesia-ini-rincian-dan-sebarannya-1731406317>
- MDI. (2015). *Ensuring secure areas. Indian maritime security strategy*. Ministry of Defence of India (Indian Navy).

- MEAI. (2017, August 31). Address by external affairs minister at the 2nd Indian ocean conference (31 August 2017) [Press release]. <https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/28907/Address+by+External+Affairs+Minister+at+the+2nd+Indian+Ocean+Conference+August+31+2017>
- Medcalf, R. (2020). Contest for the Indo-Pacific: Why China won't map the future in. LaTrobe University Press.
- MFAPRC. (2018, March 9). Foreign minister Wang Yi Meets the Press [Press release]. Retrieved from https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1540928.shtml
- Mtero, F. (2017). Rural livelihoods, large-scale mining and agrarian change in Mapela, Limpopo, South Africa. *Resources Policy*, 53, 190–200. doi:<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.06.015>
- Naem, A. (2025, February 25). Nestapa nelayan terdampak kawasan industri 'hijau' Kaltara. *Mongabay*. <https://mongabay.co.id/2025/02/27/nestapa-nelayan-terdampak-kawasan-industri-hijau-kaltara/>
- Nasution, R. (2025, May 21). Closer look at Prabowo's good neighbor foreign policy. *Antara News* <https://en.antaranews.com/news/356009/closer-look-at-prabowos-good-neighbor-foreign-policy>
- Priamarizki, A. (2024). Understanding the domestic determinants of Indonesia's hedging policy towards the United States and China. *Contemporary Southeast Asia*, 46(1), 19–42.
- Rakhmayanti, I. (2025, May 15). Uang rp 1.000 triliun terancam hilang di 2025 gara-gara judi online. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250515125927-37-633524/uang-rp-1000-triliun-terancam-hilang-di-2025-gara-gara-judi-online>
- Respati, A. R., & Setiawan, S. R. D. (2023, October 26). Pengamat: Banyaknya penawaran judi “online” akibat kebocoran data pribadi. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2023/10/26/090000426/pengamat--banyaknya-penawaran-judi-online-akibat-kebocoran-data-pribadi>
- Rubbers, B. (2020). Mining boom, labour market segmentation and social inequality in the congolese copperbelt. *Development and Change*, 51(6), 1555–1578. Doi:<https://doi.org/10.1111/dech.12531>
- Subianto, P. (2024, June 12). The road ahead for Indonesia—one of the fastest growing economies in Asia | Opinion. *Newsweek*. <https://www.>

newsweek.com/road-ahead-indonesiaone-fastest-growing-economies-asia-opinion-1911354

- Sulistyo, P. D. (2024, June 30). PDN diretas ”ransomware”, keamanan siber jangan dipandang sebelah mata. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pdn-diretas-ransomware-keamanan-siber-jangan-dipandang-sebelah-mata>
- Taylor, B. (2020). Is Australia’s Indo-Pacific strategy an illusion? *International Affairs*, 96(1), 95–109. Doi:10.1093/ia/iiz228
- Terauds, K. (2017). *Using trade policy to drive value addition: Lessons from Indonesia’s ban on nickel exports. Background document to the commodities and development report 2017*. https://unctad.org/system/files/non-official-document/suc2017d8_en.pdf
- TJP. (2024, April 3). Looking east. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2024/04/03/looking-east.html>
- Toumbourou, T. D., Dressler, W. H., & Werner, T. T. (2022). Plantations enabling mines: Incremental industrial extraction, social differentiation and livelihood change in East Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 119, 106157. Doi:<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106157>
- Utama, V. R. (2025, June 02). Indonesia’s foreign policy is all style, no substance. *East Asia Forum*. <https://eastasiaforum.org/2025/06/02/indonesias-foreign-policy-is-all-style-no-substance/>
- Wangge, H. (2025, February 12). Pekerjaan rumah kebijakan luar negeri RI di Pasifik. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pekerjaan-rumah-kebijakan-luar-negeri-ri-di-pasifik>
- Wu, Y.-H., & Huy, P. Q. (2022). Geopolitics of critical minerals. In S. E. Burke, L. Hughes, P. Q. Huy, K. Vekasi, & Y.-H. Wu (Eds.), *Critical Minerals: Global Supply Chains and Indo-Pacific Geopolitics. The National Bureau of Asian Research (NBR) Special Report 102* (pp. 1–11). National Bureau of Asian Research (NBR).
- Yadav, A. S. (2025, March 10). Arah baru kebijakan luar negeri Indonesia. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/arah-baru-kebijakan-luar-negeri-indonesia>